



Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 dan Antisipasinya)

Ubedilah Badrun

Pengajar Sosiologi Politik Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNJ
Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia),
Ketua Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Email : ubedilah.badrn@gmail.com

ABSTRAK

Memasuki era masyarakat digital (digital society) sebagai salah satu pertanda penting revolusi industri generasi keempat (4.0), keadaan dunia termasuk Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak mudah, termasuk tantangan dibidang politik. Diantara problem tersebut adalah kontestasi politik yang melebar memanfaatkan media digital telah memicu terjadinya pembelahan, ketegangan dan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat yang semula latent (maya), berpotensi manifest dan berproses meluas. Artikel ini menjelaskan tentang sejumlah problem krusial ketahanan nasional bidang politik di Era Demokrasi digital (digital democracy) dan sejumlah tantangan ditahun politik 2018-2019 beserta tawaran antisipasinya. Dengan menggunakan perspektif Liquid Modernity, masyarakat digital (digital society), demokrasi digital (digital democracy), teori sistem politik dan perspektif teori identitas bangsa penulis mengurai sejumlah tantangan. Diantaranya tantangan terkait problem sosial dan politik kebangsaan. Tawaran antisipasi yang dikemukakan dalam artikel ini adalah terkait merawat identitas kebangsaan dan perbaikan sistem politik Indonesia yang efektif, adaptif namun demokratis ditengah situasi revolusi industri generasi ke empat (the fourth industrial revolution) yang terus berubah secara cepat.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara penting yang keberadaannya dibutuhkan Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia secara luas. Keberadaan posisi penting tersebut seringkali dipahami argumentasinya karena posisi geografis Indonesia yang strategis. Sesungguhnya bukan hanya karena posisi geografis yang strategis tetapi banyak faktor yang membuat posisi Indonesia begitu penting bagi dunia. Secara sosial meningkatnya jumlah penduduk Indonesia hingga mencapai 257.912.349 jiwa (Kemendagri, 2017) adalah pangsa pasar penting di era masyarakat digital (*digital society*) saat ini. Oleh karenanya Indonesia dipastikan menjadi tujuan investasi penting dari sejumlah negara pemodal untuk menanamkan investasinya diarah ekonomi digital.

Secara politik, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal juga menjadi urgensi tersendiri bagi dunia karena dengan praktik demokrasi liberal yang berjalan, Indonesia telah memberi kontribusi bagi perkembangan politik dunia dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang demokratis. Dinamika politik yang konstruktif pada akhirnya akan menghadirkan stabilitas politik, dan stabilitas politik Indonesia tentu memberi kontribusi bagi stabilitas kawasan dan dunia secara luas. Situasi politik yang stabil menjadi prasarat penting bagi bergeraknya *kapitalisme global*. Hal itu merupakan sebuah idealitas dari arah demokrasi liberal.

Menurut laporan Daniel Kliman dari *German Marshall Fund* (GMF) dan Richard Fontaine dari *Center for a New American Security* (CNAS) (27 November 2012), Indonesia menjadi bagian penting dari apa yang disebut

global swing states atau negara yang bisa menentukan arah pergerakan politik dan ekonomi dunia. Selain Indonesia, ada Brazil, India, dan, Turki. Lebih lanjut dalam website resmi *The German Marshall Fund of The United States* (www.gmfus.org) dikemukakan bahwa ada empat rekomendasi keterlibatan Amerika terhadap negara yang termasuk katagori global swing states. Empat rekomendasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya Indonesia, termasuk tiga negara lainnya di mata Amerika Serikat dan dengan demikian juga berarti dimata dunia. Dalam laman tersebut dikemukakan sebagai berikut.

“The authors offer policy prescriptions specific to each of the four countries while recommending that the United States’ engagement with the global swing states include four broad components :

- 1. Capitalizing on areas where Brazil, India, Indonesia, and Turkey have already taken on new global responsibilities;*
- 2. Addressing some of the demands of the “global swing states” for greater representation in international institutions;*
- 3. Helping the four countries strengthen their domestic capacity to more actively support the international order;*
- 4. Increasing the resources and attention that the U.S. government devotes to these nations to better match their rising strategic importance.”*

Rekomendasi di atas terkait pemanfaatan negara yang termasuk kategori *global swing states* (Brazil, India, Indonesia, Turki) dalam mengambil peran tanggung jawab global

yang baru, pelibatan dalam institusi internasional, memperkuat kapasitas domestik dalam kerangka tatanan internasional, dan memperkuat sumber daya negara yang termasuk dalam *global swing states*. Rekomendasi tersebut menggambarkan betapa posisi Indonesia dan tiga negara lainnya yang masuk katagori *global swing states* sangat penting keberadaanya bagi masa depan dunia.

Namun sesungguhnya seiring dengan praktik politik demokrasi liberal yang terjadi di Indonesia sejak 2004 yang ditandai dengan adanya pemilihan Presiden secara langsung yang kemudian disusul pemilihan kepala daerah secara langsung, kini Indonesia menghadapi berbagai persoalan sosial, politik dan bahkan ekonomi yang membutuhkan solusi sistemik agar memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan era revolusi industri generasi ke empat saat ini (Industry 4.0).

Revolusi industri generasi keempat ditandai dengan kemunculan super-komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Klaus Schwab (14 Januari 2016), *founder and executive chairman, world economic forum Geneva* dalam artikelnya yang dimuat di laman resmi *World Economic Forum* berjudul *The Fourth Industrial Revolution : what It means, how to respond* menggambarkan situasi revolusi industri generasi ke empat seperti berikut ini :

“The possibilities of billions of people connected by mobile devices, with unprecedented processing power, storage capacity, and access to knowledge, are unlimited. And



these possibilities will be multiplied by emerging technology breakthroughs in fields such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, autonomous vehicles, 3-D printing, nanotechnology, biotechnology, materials science, energy storage, and quantum computing.”

Situasi yang digambarkan Klaus Schwab di atas terjadi saat ini dan akan terus berkembang begitu cepat. Bahwa kemungkinan akan miliaran orang yang terhubung dengan perangkat mobile, dengan kekuatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan akses pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak terbatas. Dan kemungkinan ini akan terus berkembang berkali-kali lipat dengan terobosan teknologi baru di bidang seperti kecerdasan buatan, robotika, Internet, kendaraan otonom, pencetakan 3-D, nano teknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum.

Tentu keadaan tersebut memberi pengaruh tidak hanya pada kemajuan teknologi komunikasi, tetapi juga pada ekonomi dan politik. Pengaruh revolusi industri generasi keempat telah terasa pada politik Indonesia, ada semacam persoalan sekaligus tantangan di area sosial politik. Ada semacam proses redistribusi dan desentralisasi peran kekuasaan selain negara atau ada perluasan partisipasi publik, semakin variatif, kompleks dan bahkan cenderung sulit dikontrol.

Publik dengan mudah menggunakan teknologi digital dalam mengemukakan pendapat di ruang maya, bahkan publik dengan mudah menyebarkan berita bohong, bahkan yang berbau fitnah dan menyinggung SARA (Suku, Agama dan

Ras). Ketika musim kontestasi politik tiba seperti pilkada 2018 ini, pileg maupun pilpres serentak pada 2019 mendatang, media sosial nampak mulai menjadi arena kontestasi yang penuh watak antagonistik, menjadi arena pembelahan sosial yang berpotensi mendorong terjadinya disintegrasi sosial secara manifes (nyata) yang dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia. Situasi demikian terjadi meninggi sejak pilkada DKI 2012, Pilkada DKI 2017 dan Pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah kabupaten kota dan provinsi saat ini. Ini yang kemudian disebut sebagai situasi wajah ganda digital democracy (demokrasi digital), kekacauan sekaligus tantangan demokrasi. Ini sebuah realitas yang tak bisa dielakan. Fenomena ini memerlukan respon cerdas sekaligus respon adaptif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) politik, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, penyelenggara pemilu, pekerja politik, maupun rakyat secara luas terhadap situasi dan dinamika perkembangan revolusi industri generasi ke empat ini.

Pokok Masalah

Berikut ini pokok-pokok masalah yang ingin dijawab dalam artikel ini:

- (1) *Bagaimana kemungkinan munculnya problem sosial dan politik di era masyarakat digital saat ini sebagai problem ketahanan nasional di-bidang politik ?*
- (2) *Bagaimana antisipasi secara rasional yang mungkin dilakukan dalam menjamin ketahanan nasional dibidang politik tak terganggu meski memasuki tahun politik 2018-2019?*

(3) *Bagaimana solusi sistemik agar mampu menghadirkan sistem politik efektif, adaptif, demokratis dan tetap mampu menjaga identitas bangsa ditengah arus perubahan revolusi generasi keempat saat ini?*

Tujuan

Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang kemungkinan sejumlah problem krusial ketahanan nasional bidang politik di Era Demokrasi digital (digital democracy) dan sejumlah tantangan ditahun politik 2018-2019 beserta tawaran antisipasinya secara sistemik.

Tinjauan Pustaka: Dari Perspektif Liquid Modernity Hingga Digital Democracy

Sebelum era revolusi industri generasi keempat saat ini, dunia memasuki era modern kemudian era postmodern. Seorang sosiolog berpengaruh yang melewati tiga masa peradaban dunia Zygmunt Bauman (1925-2017) menjelaskan dengan detail karakteristik masyarakat modern dan masyarakat post modern. Menurut Zygmunt Bauman (2006) masyarakat di era modern adalah masyarakat yang berada dalam kebutaan etis. Kebutuhan etis ini terjadi karena adanya pemisahan fungsional yang memiliki dampak tertentu sehingga menjauhkan individu dengan individu-individu lainnya. Oleh karena adanya jarak sosial dalam masyarakat, maka tidak ada nilai-nilai etis pada episode modern. Moralitas menjadi nilai yang berharga yang dikesampingkan atau bahkan diusungkan di era modern.

Sementara era postmodern, menurut Zygmunt Bauman (1997) diantaranya

ditandai dengan berkembangnya pengetahuan yang berkembang seperti cairan, tidak memiliki bentuk tetap dan terus bergerak dengan bebas ke mana pun ia pergi dan beranjak. Dengan kata lain, tidak ada sebuah bentuk yang pasti dan utuh sehingga kebenaran itu akan terus berubah sesuai dengan konteks lingkungan sekitarnya. Ada semacam ketidakpastian, baik secara ilmu pengetahuan dan teknologi maupun secara sosial.

Perspektif Zygmunt Bauman (2006) tersebut memberikan suatu gambaran penting sebagai latar peradaban yang kemudian memasuki era masyarakat digital (*digital society*) saat ini. Karakteristik era modern dan postmodern yang dipaparkan Zygmunt Bauman sesungguhnya masih belum pudar sepenuhnya hingga era masyarakat digital (*digital society*) saat ini, tetapi karakteristik tersebut masih terus mengalami dinamika dan kompleksitasnya sendiri berdinamika dalam era masyarakat digital, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.

Kini dunia memasuki era masyarakat digital (*digital society*). Adrian Athique (2013), dalam bukunya *Digital Media and Society* memaparkan berbagai implikasi yang timbul dari perkembangan teknologi informasi, internet, dan kehadiran media digital. Kehadiran media sosial yang berbasis internet dan gadget telah melahirkan masyarakat baru, yakni masyarakat digital yang sayangnya secara kultural masih belum didukung perkembangan kultural yang siap merespons perubahan secara cepat.

Dengan mencermati perkembangan teknologi informasi yang terus berubah maka dunia secara keseluruhan



berubah, konsep dan praktek demokrasi juga berubah, demokrasi itu tidak statis. Franklin Roosevelt (1941) pada menjelang Perang Dunia II pernah mengatakan *democracy is not static thing*. Demokrasi bukanlah konsep yang statis, kemampuan adaptif demokrasi pada perubahan menjadi kelebihan tersendiri sari sistem demokrasi. Konsep klasik demokarasi yang pernah dikemukakan Abraham Lincoln (1858) bahwa “*democracy is a government of the people, by the people, and for the people*”, substansinya tidak pernah akan hilang bahwa rakyat menjadi penentu utama jalannya demokrasi.

Tetapi perkembangan teknologi informasi telah mendorong hadirnya pola-pola baru dalam berdemokrasi.

Memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat telah terjadi saat ini. Pola ini yang kemudian disebut sebagai demokrasi digital. Jan Van Dijk (2013) dalam bukunya *Digital Democracy : Vision & Reality* mengemukakan bahwa demokrasi digital didefinisikan sebagai *Practice of democracy in whatever view using digital media in online and offline political communication*. Definisi ini lebih memperjelas bahwa titik utama demokrasi digital bukan pada pandangan demokrasinya tetapi lebih pada seberapa mudah praktek demokrasi tersebut menggunakan media digital dalam melakukan komunikasi politik. Narasi awal diskursus demokrasi digital yang dijelaskan Jan Van Dijk terdapat dalam buku *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice* yang ditulis Kenneth L.Hacker bersama Jan Van Dijk (2001).

Yanu Endar Prasetyo (26 Oktober 2016a) dalam artikelnya tentang

Demokrasi Digital mengutip sejumlah hasil penelitian Gilardi (2016), bahwa dalam penelitian Gilardi tentang digital democracy, dijelaskan dengan gamblang bagaimana teknologi digital mempengaruhi proses demokrasi. Mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga perangkat dan saluran tata kelola pemerintahan pun mulai berubah. Tidak hanya di Barat, tetapi juga di belahan dunia mana pun di saat teknologi digital mulai mendominasi. Tidak hanya pada praktik politik dalam demokrasi kontemporer, revolusi teknologi digital ini juga secara langsung telah memengaruhi bagaimana ilmu-ilmu sosial direproduksi dan disebarluaskan. *Big data, sains kompleksitas, crowd sourcing*, mesin pembelajaran baru, hingga kurikulum ilmu sosial di berbagai perguruan tinggi rujukan dunia pun turut beradaptasi dengan revolusi digital ini. Demokrasi digital ialah era baru dalam sejarah manusia sekaligus masa depan dunia itu sendiri.

Yanu Endar Prasetyo (26 Oktober 2016) juga mengutip hasil penelitian Jae Min (2010) tentang the democratic divide yang menunjukkan bahwa 43% dari pengguna internet di Amerika Serikat teridentifikasi sebagai political internet user, yaitu mereka yang secara sadar dan aktif menggunakan internet untuk mendapatkan informasi politik maupun untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka juga aktif dan bergabung dalam kelompok diskusi politik di dunia maya. Profil netizen--istilah pembanding untuk citizen yang aktif sebagai political internet user itu masih sangat dipengaruhi faktor demografis seperti gender (laki-laki), pendidikan (tinggi), usia (muda), dan pendapatan (menengah atas).

Fenomena tersebut misalnya bisa dicermati di Amerika Serikat pada saat kampanye Barack Obama menjadi calon Presiden Amerika Serikat pada tahun 2009 (untuk periode 2009-2013) dan 2013 lalu (untuk periode 2013-2017). Dalam artikel yang berjudul Digital Demokrasi; Cita Rasa Baru Politik, media rilis.id mengutip data dari Kompas.com yang menyebutkan bahwa Kampanye Barack Obama yang menggunakan web 2.0, seperti *YouTube*, *MySpace* dan terutama *Facebook* untuk menarik donasi dari pendukungnya. Obama mendapatkan dana kampanye sebesar 454 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan menghabiskan 377 juta dollar AS, tertinggi dalam sejarah Amerika dan dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 95 persen dari situs jejaring sosial (rilis.id 14 Februari 2017).

Sejak sepuluh tahun sebelumnya, Amerika Serikat memang sudah mulai akrab dengan dunia digital, bahkan direspon pemerintahnya untuk berbasis digital dalam memberikan pelayanan publik. Pada tahun 1998, *National Science Foundation (NSF) Amerika Serikat berkolaborasi dengan University of Southhern California's Information Science Institute (USC/ISI) dengan Columbia University's Department of Computer Science*, memulai program pertamanya dalam Pemerintahan Digital (*Digital Government, DG*) dan digital *Society*. Program itu mengumumkan bahwa *The Federal Government is a major user of information technologies, a collector and maintainer of very large data sets, and a provider of critical and often unique information services to individuals, states, businesses, and other customers*. Perkembangan teknologi informasi yang diciptakan menjadi patner pemerintah dan

masyarakat untuk mewujudkan good government dan digital society. (Poltak Sihombing & Jonson Rajagukguk, 2013, hlm.4)

Pada tahun 2009 fenomena *facebookers* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam konteks demokrasi digital, ini terkait partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan atau suatu keadaan. Diantara contohnya adalah dukungan *facebookers* terhadap Prita Mulyasari terkait masalah dengan RS Omni Tengerang dan Gerakan 1.000.000 *facebookers* yang mendukung Bibit-Chandra komisioner KPK saat berkonflik dengan Kepolisian yang mencapai lebih dari 1 juta pendukung. Ini episode penting partisipasi publik melalui media sosial yang terjadi di Indoneisa dan mampu mempengaruhi arah kebijakan atau suatu keadaan pada saat itu sehingga Prita Mulyasari terselamatkan dan KPK mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Fenomena tersebut juga menggambarkan suatu fenomena gerakan sosial baru yang memunculkan gerakan sosial tanpa rapat-rapat gerakan tetapi menunjukkan bahwa orang begitu mudah menjadi aktivis, mengusung isu sosial tertentu, mempropagandakanya melalui media sosial dan mendapat dukungan. Meskipun mereka tidak saling kenal memungkinkan mereka bisa bersatu untuk menyuarakan suatu aspirasi tertentu. Ada semacam meta komunikasi antar pengguna media sosial atau komunikasi tanpa harus bertemu secara fisik hadir dalam suatu ruang dan waktu yang sama.

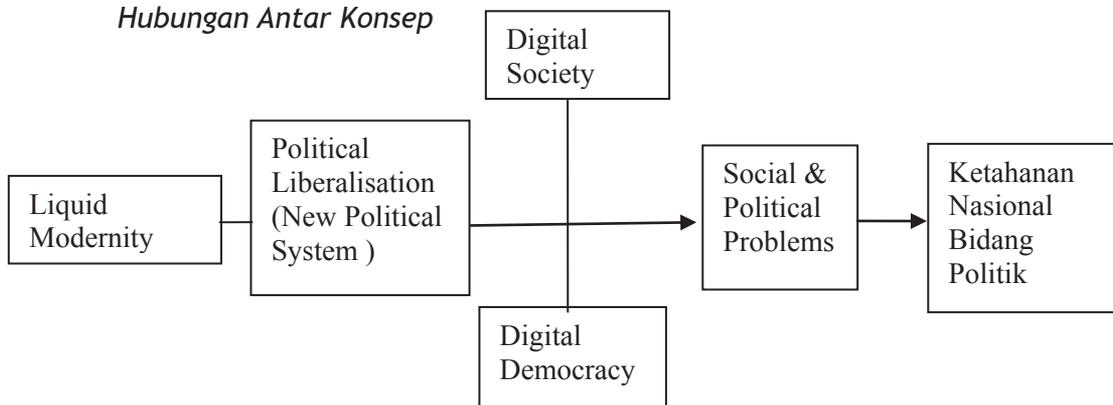
Fenomena demokrasi digital tersebut semakin menemukan arena nya seiring dengan liberalisasi politik yang terjadi di Indonesia sejak 2004



pada saat dimulainya sistem politik baru yaitu pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Contoh pemilihan kepala daerah secara langsung yang meningkatkan tensi sosial dan politik melalui media sosial adalah terjadi pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2012 dan tahun 2017. Episode ini yang kemudian menghadirkan problem sosial dan politik baru yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional di bidang politik.

penting revolusi industri generasi keempat (4.0) yang ditandai dengan bermunculannya produk-produk digital yang kemudian membentuk apa yang disebut masyarakat digital (*digital society*). Fenomena ini celakanya tidak bisa dilokalisir misalnya hanya terjadi di Amerika Serikat tetapi karena perkembangan teknologi informasi secara digital ini terjadi secara cepat dan meluas dengan mudah diakses dan disebarakan produknya keseluruh dunia. Kehadiran smartphone semakin

Gambar 1
Hubungan Antar Konsep



Sumber : Analisis Penulis,2018

PEMBAHASAN

Ketika perubahan dunia memasuki era masyarakat digital (*digital society*), karakteristik masyarakat modern dan postmodern tidak sepenuhnya hilang. Diantara karakteristik modern dan post modern yang paling menonjol yang tidak hilang selain rasionalitas adalah pengabaian terhadap hal-hal etis dan perubahan yang terus menerus tanpa bentuk yang pasti. Dalam situasi seperti ini dunia memasuki episode

memudahkan digitalisasi dan akses manusia untuk terhubung secara lintas batas dan lintas negara. Oleh karenanya situasi ini tidak bisa dibendung dan mau tidak mau memasuki Indonesia.

Pada ranah politik, partisipasi rakyat tidak hanya terjadi secara konvensional misalnya melalui suatu gerakan demonstrasi tetapi hadirnya masyarakat digital telah merubah pola partisipasi dari konvensional menjadi digital. Ini yang kemudian disebut sebagai episode demokrasi digital (*digital democracy*). Pada saat yang sama liberalisasi



Daftar Provinsi dan Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada 2018

No	PROVINSI	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
1	Sumatera Utara	Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Djarot Saiful-Sihar Sitorus, JR Saragih-Ance Selian
2	Riau	Syamsuar-Edy Nasution, Lukman Edy-Hardianto, Firdaus-Rusli Efendi, Arsyaduliandi Rachman-Suyatno
3	Sumatera Selatan	Herman Deru-Mawardi Yahya, Ishak Mekki-Yudha Pratomo, Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas, Saifudin Aswari-Irwansyah
4	Lampung	Herman H-Sutono, M Ridho Ficardo-Helmi Hasan, Mustafa-Ahmad Jazuli, Arinal Djunaidi-Chusnia Chalim
5	Jawa Barat	Sudrajat-Ahmad Syaikhu, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum
6	Jawa Tengah	Sudirman Said-Ida Fauziyah, Ganjar Pranowo- Taj Yasin
7	Jawa Timur	Khofifah Indar P - Emil Dardak, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno
8	Bali	Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha, Ida Bagus Rai D M-I Ketut Sudikerta
9	Nusa Tenggara Barat	Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi, Tuan Guru Haji Ahyar Abduh-Mori Hanafi, Moch Ali B D- TGH Lalu Gede M Ali, Moh Suhaili Fadil T-Muh Amin
10	Nusa Tenggara Timur	Benny K Harman-Benny Alexander L, Eathon Leyloh F-Christian Rotok, Marianus Sae-Emilia Nomleni, Viktor B Laiskodat-Yoseph Nae Soi
11	Kalimantan Barat	Karolin Margaret N- Suryadman G, Sutarmidji-Ria Norsan, Kartius-Pensong, Milton Crosby-Boyman Harun
12	Kalimantan Timur	Rusmadi Wongso-Safaruddin, Syaharie Jaang-Awang Ferdian, Andi Sofyan-Nusyirwan Ismail, Isran Noor-Hadi Mulyadi
13	Sulawesi Selatan	Nurdin Halid-Qahhar Mudzakkar, Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar, Agus Arifin N-Tanribali Lamo
14	Sulawesi Tenggara	Asrun-Hugua, Rusda-Sjafei, Ali Mazi-Lukman Abunawas
15	Maluku	Murad Ismail-Barnabas Orno, Said Assagaf-Anderias R, Herman Adrian-Abdullah Vanath
16	Papua	Lukas Enembe-Klemen Timal, John Wempi W-Habel Melkias Suwae, Ones Pahabol-Petrus Yoram Mambai
17	Maluku Utara	Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar, Burhan Abdurrahman-Ishak Jamaludin, Muhammad Kasuba-Madjud Husen, Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali

Sumber: KPU RI, 2018.

politik (*political liberalisation*) telah menghadirkan sistem politik baru (*new political system*) dimana pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung melibatkan seluruh rakyat dalam menentukan siapa presiden dan siapa kepala daerah dengan *pola one man one vote* (satu orang satu suara).

Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disebut berbagai kalangan sebagai tahun politik karena ada dua moment politik besar yaitu pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah (provinsi, kota dan kabupaten) dan pemilihan umum serentak (pemilu legislatif dan pemilu presiden secara



bersamaan) pada 2019. Dari 171 daerah yang mengadakan pilkada 2018 tersebut ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2018 (KPU RI, 2018). Beberapa provinsi yang menjadi tolak ukur atau barometer politik nasional ada pada pilkada 2018 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku. Di enam provinsi tersebut tensi sosial dan tensi politik perlu menjadi perhatian penting semua pihak.

Dari 17 provinsi tersebut ada 116 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berkompetisi dengan persilangan koalisi partai yang tidak sederhana karena tidak ada keseragaman koalisi disetiap provinsi yang menyelenggarakan pilkada pada 2018. Tentu dengan ditambah pasangan calon wali kota-wakil walikota di 39 kota, dan calon bupati dan wakil bupati di 115 kabupaten, serta dihampir bersamaan proses tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada 2019 juga berjalan, bukanlah perkara mudah jika ditinjau dari segi ketahanan politik dan ketahanan nasional secara umum.

Problem Sosial dan Politik Di Tahun Politik Pada Era Demokrasi Digital

Pemilu kepala daerah serentak di 171 daerah pada 2018 dan proses tahapan pemilu serentak 2019 yang terus berjalan memicu naiknya tensi sosial dan tensi politik ditengah-tengah masyarakat secara nasional. Naiknya tensi sosial dan tensi politik ini mengalami lompatan dahsyat karena hadirnya era masyarakat digital (*digital society*) sehingga proses politik tersebut menjadi semakin dinamis karena penggunaan media sosial yang

semakin masif oleh mereka yang disebut oleh Jae Min (2010) sebagai political internet user (mereka yang secara sadar dan aktif menggunakan internet untuk mendapatkan informasi politik maupun untuk menyalurkan aspirasi politiknya). Jae Min menyebut ada sekitar 43% political internet user di Amerika Serikat. Sayangnya belum ada penelitian terkait berapa persen jumlah political internet user di Indonesia menjelang tahun politik.

Sebagaimana penelitian Gilardi (2016) yang dikutip Yanu Endar Prasetyo (26 Oktober 2016) mengemukakan bahwa teknologi digital mempengaruhi proses demokrasi yang berbuah hadirnya demokrasi digital (*digital democracy*), baik dalam konteks mobilisasi politik, strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga perangkat dan saluran tata kelola pemerintahan. Relasi dan intensi yang luar biasa antara digitalisasi dan proses demokrasi di tahun politik 2018-2019 dimungkinkan akan memunculkan berbagai persoalan sosial dan politik. Munculnya berbagai persoalan sosial dan politik tersebut bisa terjadi akibat dari meningginya proses mobilisasi politik, bekerjanya strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga langkah pemerintahan yang keliru kebetulan sebagai petahana yang ikut dalam kontestasi di tahun politik ini. Hal tersebut sebagai pemicu yang memang prosesnya terjadi setiap pemilu diselenggarakan. Dampaknya yang memunculkan problem sosial politik memang lebih membahayakan karena seiring dengan era masyarakat digital yang relatif sulit dikendalikan.

Setidaknya ada tujuh persoalan sosial politik yang mungkin terjadi di era demokrasi digital dan tahun politik 2018-2019 ini :

- **Pertama**, meningginya tensi sosial atau ketegangan sosial diantara masyarakat. Ini terjadi jika kontestasi politik baik pilkada 2018 maupun pemilu serentak 2019 melibatkan emosi publik yang didorong oleh gencarnya serangan politik (political attack) terhadap lawan politik yang dilakukan melalui media sosial secara liar. Potensi serangan liar ini dilakukan oleh apa yang disebut sebagai tim cyber army atau tentara siber yang dibuat oleh tim konsultan politik maupun oleh para relawan dengan dalih untuk memenangkan pertarungan.
- **Kedua**, terjadi kekacauan sosial bernuansa SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan). Ini terjadi jika saling mengkritik antar pendukung atau relawan terjadi di media sosial dengan content atau isi kritik yang berbau SARA dan terjadi secara liar tidak mampu dikontrol oleh negara (Kementerian Komunikasi dan Informasi/Kominfo) atau oleh penyelenggara pemilu. Ini akan diperparah jika elit politik dan konsultan politik menjadikan isu SARA sebagai isu dalam kampanye negatif dan kampanye hitam mereka.
- **Ketiga**, terjadi pembelahan sosial. Ini terjadi jika kontestasi berlangsung secara head to head, calon pasangan yang bertarung hanya dua pasang. Masyarakat akan terbelah dalam dua kubu besar antara yang mendukung pasangan calon tertentu berhadapan dengan masyarakat yang mendukung pasangan yang lain. Pelibatan emosional akan semakin memperuncing keterbelahan masyarakat. Pelibatan emosional ini terjadi jika masing-masing kubu keberpihakannya pada pasangan sudah melibatkan emosi secara subyektif.
- **Keempat**, konflik antar pendukung dalam pelaksanaan mobilisasi kampanye. Ini terjadi jika ekspresi mobilisasi para pendukung calon kepala daerah tertentu secara vulgar dihadapan para pendukung calon kepala daerah lainya yang dilakukan di dunia nyata, misalnya ada konflik fisik antar pendukung yang berakibat adanya korban luka atau lebih dari itu lalu difoto atau diambil gambarnya lalu disebarakan tanpa sumber yang jelas di media sosial.
- **Kelima**, konflik antar partai politik pendukung calon kepala daerah atau calon presiden. Ini terjadi jika masing masing kubu partai pendukung melakukan serangan politik atau kritik terbuka terhadap partai pendukung calon pasangan lainya. Ini bisa terjadi antar tim sukses yang dimiliki partai politik.
- **Keenam**, konflik antar calon kepala daerah atau calon presiden yang didukung para pendukungnya. Ini terjadi jika calon kepala daerah atau calon presiden tidak menerima hasil rekapitulasi suara hasil pemilu dalam pleno KPU.
- **Ketujuh**, konflik antar partai dengan lembaga penyelenggara pemilu. Ini terjadi jika terjadi perbedaan sikap dalam pengambilan keputusan diantara para penyelenggara pemilu, maupun dalam proses pasca pilkada. Ini misalnya terjadi antara partai politik dengan Panwas, KPU, Bawaslu, DKPP, Gakumdu dan seterusnya sebaliknya, bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika hasil pemilu diperkarakan.



Skema Faktor Pemicu dan Potensi Problem Sosial Politik Di Tahun Politik



Sumber : Analisis Penulis,2018

Ini makin rumit dan panjang jika 50 % saja di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada mengajukan gugatan hasil pemilu hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Antisipasi Rasional Yang Mungkin Dilakukan

Menghadapi kemungkinan munculnya berbagai problem sosial politik di tahun politik 2018-2019 sebagaimana yang telah diurai di atas maka setidaknya ada lima langkah rasional yang mungkin bisa dilakukan sepanjang tahun politik ini. Lima langkah rasional tersebut adalah:

1. Meminimalisir liarnya dinamika media sosial yang membahayakan keutuhan bangsa. Menghilangkan dan melarang media sosial

adalah hal yang tidak mungkin karena bertentangan dengan arus utama dunia dan bertentangan dengan kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang paling rasional dan mungkin dilakukan adalah meminimalisasi liarnya dinamika media sosial. Upaya meminimalisasi tersebut bisa dilakukan dengan pemantauan intensif dari Kominfo dan pihak kepolisian untuk segera menghentikan komunikasi liar yang membahayakan keutuhan bangsa. Ini bisa dilakukan sepanjang tahun politik atau bahkan bisa seterusnya.

2. Melakukan pendidikan politik melalui media sosial agar masyarakat memiliki *political literacy* (melek politik). Dengan

literasi politik yang baik maka diharapkan masyarakat memiliki kematangan politik. Upaya ini bisa dilakukan sepanjang tahun politik sampai sebelum hari pemilihan umum dilangsungkan. Model pendidikan politik melalui media sosial ini bisa dilakukan dengan model *visualisasi* atau gambar yang menarik untuk mendorong masyarakat agar menjadi warga negara yang matang secara politik atau tidak mengumbar emosi subjektif dalam merespon dinamika politik di tahun politik.

3. Pihak penyelenggara pemilu melakukan koordinasi dengan partai politik dan tim partai pendukung pasangan calon untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koordinasi tersebut dilakukan terutama terkait implementasi mobilisasi politik, strategi kampanye, dan kemungkinan polarisasi opini publik akibat aktivitas kampanye yang dilakukan oleh partai politik.
4. Pihak penyelenggara pemilu perlu mendata tim siber dari tim pemenang calon pasangan yang ikut dalam kontestasi agar dapat mendeteksi kemungkinan aktivitas di media sosial yang terjadi secara tak terkendali oleh tim siber dari tim pemenang pasangan calon.

Sistem Politik Efektif, Adaptif, Demokratis Dalam Bingkai Kebangsaan sebagai Solusi Sistemik

Jika berbagai solusi rasional yang dilakukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial dan politik yang mengancam ketahanan nasional di bidang politik telah dilakukan dan ternyata kemudian berbagai persoalan

sosial politik tetap terus bermunculan bahkan cenderung makin liar dan membahayakan keutuhan negara maka solusi terbaik adalah menghadirkan Sistem Politik Efektif, Adaptif, Demokratis yang mampu menjaga keutuhan sebagai bangsa.

Solusi sistemik tersebut patut dilakukan dengan melakukan evaluasi mendasar terhadap seluruh praktek politik pemilihan kepala daerah, pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Hasil evaluasi mendasar tersebut pada akhirnya akan mengarah pada pentingnya perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR/DPD hingga pemilihan umum Presiden. Evaluasi mendasar tersebut menggunakan logika induktif mengurai berbagai persoalan secara detail sehingga kemudian ditemukan jawaban solusi sistemik. Untuk menghadirkan solusi sistemik dalam bingkai kebangsaan perlu menjawab pertanyaan mendasar apakah praktik demokrasi yang selama ini berjalan lebih banyak menghadirkan kemudharatan atau tidak? Jika iya, apa saja problem yang menghadirkan kemudharatan tersebut? Jika detail jawaban kemudharatannya terlalu banyak maka kesimpulannya sistem politik harus diubah. Mengubah sistem politik perlu mengubah undang-undang politiknya. Saat mengubah undang-undang politik perlu mengajukan pertanyaan mendasar apakah Pancasila sebagai ideologi negara dapat diterjemahkan dalam sistem politik? Jika jawabannya Iya maka sistem politik seperti apa yang bisa diterjemahkan sesuai ideologi negara Pancasila? Jawabannya adalah Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ideologi yang jelas adalah wajar untuk merumuskan sistem politiknya sendiri



yang khas sebagaimana juga negara negara lain yang khas mempraktekan sistem politiknya sendiri seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, China, Arab, Malaysia dan seterusnya.

Sesungguhnya sistem politik yang dibutuhkan negara untuk maju sebagai negara besar adalah sistem politik yang efektif, adaptif dan demokratis sesuai karakteristik atau ideologi bangsanya. Bukan sistem politik yang seolah demokratis dan sangat liberal tetapi tidak efektif dalam mencapai tujuan negara bahkan cenderung merusak identitas bangsanya dan berujung pada kehancuran negara. Bagaimana sistem politik yang efektif, adaptif, demokratis dan sesuai karakteristik atau ideologi bangsa? Jawaban ini membutuhkan narasi yang lebih detail, panjang dan membutuhkan penelitian yang lebih serius yang tidak cukup dijawab dalam artikel singkat ini.

"kemudian berbagai persoalan sosial politik tetap terus bermunculan bahkan cenderung makin liar dan membahayakan keutuhan negara maka solusi terbaik adalah menghadirkan Sistem Politik Efektif, Adaptif, Demokratis yang mampu menjaga keutuhan sebagai bangsa"

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Karakteristik masyarakat modern dan postmodern saat ini tidak sepenuhnya hilang. Diantara karakteristik modern dan post modern yang paling menonjol yang tidak hilang selain rasionalitas adalah pengabaian terhadap hal-hal etis dan perubahan yang terus menerus tanpa bentuk yang pasti (*liquid modernity*). Dalam situasi seperti ini dunia memasuki episode penting revolusi industri generasi keempat (4.0) yang ditandai dengan bermunculannya produk-produk digital yang kemudian membentuk apa yang disebut masyarakat digital (*digital society*) dan akhirnya menghadirkan demokrasi digital (*digital democracy*).
- b. Relasi dan intensi yang luar biasa antara digitalisasi dan proses demokrasi di tahun politik 2018-2019 dimungkinkan akan memunculkan berbagai persoalan sosial dan politik. Munculnya berbagai persoalan sosial dan politik tersebut bisa terjadi akibat dari meningginya proses mobilisasi politik, bekerjanya strategi kampanye, polarisasi opini publik, hingga langkah pemerintahan yang keliru yang kebetulan sebagai petahana yang ikut dalam kontestasi di tahun politik ini.
- c. Problem sosial politik yang mungkin akan hadir di tahun politik 2018-2019 adalah :
 - (1) meningginya tensi sosial politik,
 - (2) kekacauan sosial bernuansa SARA,
 - (3) pembelahan sosial,

- (4) konflik antar dan antar partai politik,
- (5) konflik antar pendukung partai,
- (6) konflik antar calon kepala daerah atau calon presiden, dan
- (7) konflik antar partai politik dan penyelenggara pemilu atau sebaliknya.

Saran

- a. Diperlukan solusi rasional untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial politik di tahun politik 2018-2019. Diantara solusi rasional tersebut adalah :
 - (1) meminimalisir liarnya dinamika media sosial yang membahayakan keutuhan bangsa,
 - (2) Penyelenggara pemilu dan stakeholders politik lainnya melakukan pendidikan politik melalui media sosial agar masyarakat memiliki political literacy (melek politik) dan bersikap matang secara politik.
 - (3) mengintensifkan koordinasi intern dan antar penyelenggara pemilu dengan partai politik,
 - (4) pendataan tim siber dari tim kemenangan calon pasangan yang ikut dalam kontestasi agar dapat mendeteksi kemungkinan aktivitas di media sosial yang terjadi secara tak terkendali.
- b. Perlu solusi sistemik. Bahwa sesungguhnya sistem politik yang dibutuhkan negara untuk maju sebagai negara besar adalah sistem politik yang efektif, adaptif dan demokratis sesuai karakteristik atau ideologi bangsanya. Bukan sistem politik yang seolah demokratis dan sangat liberal

tetapi tidak efektif dalam mencapai tujuan negara bahkan cenderung merusak identitas bangsanya dan berujung pada kehancuran negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Athique, Adrian.(2013). *Digital Media and Society* , Publisher: Polity; 1 edition .
- Bauman, Zygmunt.(1997). *Life in Fragments: Essays Postmodern Morality*. Cambridge: Blackwell.
- Bauman, Zigmunt.(2006). *Liquid of Modernity*. Cambridge: Polity Press
- Van Dijk, Jan A.G.M.(2013). *Digital Democracy : Vision & Reality*, IOS Press
- Hacker,Kenneth L., & Van Dijk,Jan A.G.M. (2001). *Digital Democracy : Issues of Theory and Practice*, Sage Publications Ltd
- Sihombing,Poltak., & Rajagukguk, Jonson. (2013).Paradigma Goodgovernment dan Digital Society dari perspektif Single Identity Number, *Majalah Ilmiah VISI* , Universitas HKBP Nomensen, Volume 21 No.3,hlm.4
- Kliman, Daniel & Fontaine,Richard. (2012). *Global Swing States: Brazil, India, Indonesia, Turkey, and The Future of International Order*, November 27,2012.
- <http://www.gmfus.org/publications/global-swing-states-brazil-india-indonesia-turkey-and-future-international-order>.



Schwab, Klaus.(2016). The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How To Respond, January 14, 2016.

<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>

Prasetyo, Yanu Endar.(2016). Demokrasi Digital, MediaIndonesia, 26 Oktober,2016.

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/73975/demokrasi-digital/2016-10-26>

Digital Demokrasi; Citarasa Baru Politik
<http://m.rilis.id/Digital-Demokrasi-Citarasa-Baru-Politik.html>